

**TANGGUNG JAWAB PT.JASA RAHARJA DAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN PO.SUMBER SEJAHTERA TERHADAP
PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN**

ARI PURNOMO ADJI / D 101 10 218

ABSTRAK

PO. Sumber Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa dibidang pengangkutan yang menggunakan alat transportasi yang berupa kendaraan bermotor umum (bus) yang beroperasi dalam trayek antar kota antar provinsi. Sebagai sarana penyedia jasa angkutan pada masyarakat, di dalam menjalankan usahanya banyak sekali diperhadapkan dengan berbagai macam risiko yang timbul dan membahayakan jiwa para penumpang termasuk kecelakaan lalu lintas. Apabila dalam kecelakaan tersebut, penumpang menjadi korban yang mengalami kerugian materil maupun inmateril maka perusahaan pengangkutan PO. Sumber Sejahtera salah satu pihak yang bertanggung jawab berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pihak lain yang bertanggung jawab dalam kerugian yang diderita penumpang dalam kecelakaan lalu lintas yakni PT. Jasa Raharja. Dalam perumusan masalah, penulis lebih terfokus pada bagaimana bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan dan bagaimana bentuk tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan PO. Sumber Sejahtera terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari data perpustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah observasi dan wawancara. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing, beranjak dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka diperlukan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja dan tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan PO. Sumber Sejahtera terhadap penumpang korban kecelakaan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Terhadap Penumpang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini selalu diperhadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang diharapkan. Akan tetapi,

keadaannya tidak selalu demikian. Dapat saja terjadi suatu peristiwa negatif yang merugikan baik bagi dirinya, keluarganya maupun kekayaannya.¹

Risiko bukan hanya menjadi suatu hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi orang/manusia, melainkan juga terhadap pelaku

¹Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1.

bisnis, khususnya badan usaha. Badan usaha terdiri dari berbagai jenis berdasarkan bidang kegiatannya, salah satunya yakni badan usaha bidang jasa. Badan usaha dalam bidang jasa adalah usaha yang dalam kegiatannya bergerak di bidang pelayanan jasa diantaranya perusahaan pengangkutan yang menyediakan usaha jasa angkutan transportasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 139 Ayat (4), menjelaskan :

“Penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dan dalam hal perusahaan angkutan umum dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor.*

PO. Sumber Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa di bidang pengangkutan. PO. Sumber Sejahtera dalam menjalankan kegiatan usaha pengangkutannya berpotensi timbulnya kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh tiga faktor utama, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan atau cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.²

Akibat dari kecelakaan, dapat mengakibatkan kerugian materil maupun imaterial terhadap penumpang bahkan hingga menyebabkan kematian. Penumpang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di dalam suatu kendaraan umum merupakan tanggung jawab dari perusahaan angkutan umum yang dijelaskan dalam Pasal 192 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat peyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Kerugian yang diderita penumpang bukan hanya merupakan tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan melainkan pemerintah dalam hal ini juga ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang akibat dari kecelakaan lalu lintas dengan mengeluarkan peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang junks to Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaannya. Yang kemudian pelaksanaannya dipercayakan kepada PT. Jasaraharja sebagai pengelola jaminan sosial dengan sistem gotong royong.

PT. Jasa Raharja adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan baik kecelakaan penumpang maupun kecelakaan lalu lintas jalan. Dimana PT. Jasa Raharja bertugas sebagai pemupuk, penghimpun dan penyalur dana dari iuran wajib dan sumbangan wajib pemilik/perusahaan dan penumpang angkutan umum untuk para korban, baik penumpang maupun bukan penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan.

Bersarkan uraian di atas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang dirumuskan dalam sebuah judul “Tanggung Jawab Pt. Jasa Raharja Dan Perusahaan Pengangkutan Po. Sumber Sejahtera Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan

B. Permasalahan

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab PO. Sumber Sejahtera terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan?

²faktor kecelakaan dalam <http://id.wikipedia.org/24/januari/2014>. Diakses tanggal 30 januari 2014 pukul 08.33

II. PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Yang Menjadi Korban Kecelakaan.

1) Bentuk Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan

PT. Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan asuransi sosial yakni pelaksana asuransi sosial kecelakaan penumpang dan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.³

Pelaksanaan pertanggungan wajib penumpang didasarkan pada UU No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan kecelakaan penumpang dan pelaksanaannya berdasarkan PP No. 17 Tahun 1965. PT. Jasa Raharja sebagai pelaksana dari dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, memikul tanggung jawab terhadap penumpang umum, dalam hal terjadinya evenemen terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang menimbulkan kerugian non materiil. Kerugian yang dimaksud yakni kematian, luka-luka dan/atau cacat tetap.

Pasal 2 UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang bahwa *hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara iuran dana dan penguasa dana*. Dan berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 1 huruf (e) PP No. 17 tahun 1965 yakni *pertanggungan adalah hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dalam hal peraturan pemerintah ini: antara perusahaan Negara sebagai yang*

dimaksud dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah.

Ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa dari segi hukum asuransi, penguasa dana berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung. Penguasa dana sebagai penanggung memikul risiko kecelakaan yang mungkin dialami oleh pembayar iuran sebagai tertanggung.

Uraian dari ketentuan pasal 2 dan 3 UU No. 33 Tahun 1964 di atas, disimpulkan bahwa terdapat hubungan hukum yang menyebabkan pertanggungan yaitu

1. Hubungan penguasa dana dan iuran dana, di mana penguasa dana yakni PT. Jasa Raharja, sedangkan iuran dana dibayar oleh setiap penumpang yang sah melalui pengusaha yang bersangkutan.
2. Iuran wajib yang dikumpulkan melalui pengusaha, digunakan untuk mengganti kerugian penumpang akibat dari kecelakaan penumpang yang menyebabkan kematian dan/atau cacat tetap.

Akibat dari hubungan hukum tersebut, maka para pihak memiliki hak dan kewajiban. Dimana pihak PT. Jasa Raharja sebagai penanggung, berhak untuk menerima pembayaran iuran wajib dari penumpang yang dikumpulkan melalui pengusaha yang bersangkutan dan PT Jasa Raharja berkewajiban membayar santunan kepada setiap penumpang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian yang berupa kematian, cacat tetap, dan/atau luka-luka. Sedangkan pihak penumpang sebagai tertanggung berhak untuk memperoleh santunan dari pihak PT. Jasa Raharja akibat dari kecelakaan yang mengakibatkan kerugian dan berkewajiban membayar iuran wajib yang dikumpulkan oleh pengusaha melalui pembelian tiket oleh penumpang.

Khusus mengenai ruang lingkup tanggung jawab PT. Jasa Raharja dalam memberikan santunan asuransi kecelakaan penumpang sesuai dengan UU. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib

³ Sejarah PT. Jasa raharja dalam www.jasaraharja.co.id. diakses 10/2/2014 jam 20.40 wita.

Kecelakaan Penumpang, dalam pasal 3 huruf disebutkan bahwa : *Iuran waji tersebut pada sub (a) di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubungan dengan : I. Kematian, dan II Cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang.*

Adapun besaran santunan ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.10/2008 Tentang Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara yakni:

- a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang dihitung berdasarkan anka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) PP No. 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)
 - c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 2) Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan

Sebagaimana tanggung jawab berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban terhadap setiap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah, dengan memberikan santunan sebagai ganti kerugian yang disebabkan oleh evenemen.

PT. Jasa Raharja dalam menunaikan kewajibannya, dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik. Inilah yang

ke depan kami tegaskan menjadi bagian penting dalam melayani masyarakat indonesia. Dengan kata lain, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat indonesia, khususnya mereka yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas dan berada dalam ruang lingkup UU No. 33 Tahun 1964, sudah menjadi keharusan PT. Jasa Raharja. Memberikan pelayanan yang sesuai standar yang ditentukan itulah yang terus kami upayakan agar masyarakat benar-benar bisa mendapatkan haknya.⁴

Bentuk optimalisasi dan semangat memberikan pelayanan terbaik itu tercermin dalam PRIME Services sebagai nafasnya pelayanan Jasa Raharja. Semangat Proaktif, Ramah, Ikhlas, Mudah, dan Empati tersebut tak begitu saja dijalankan tetapi terus dieksplorasi dan dikembangkan sehingga masyarakat puas, khususnya mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum.

Penerapan PRIME dilakukan pula PT. Jasa Raharja cabang Sulawesi Tengah.⁵ Pelayanan dengan semangat PRIME jasa raharja cabang palu, dilakukan dengan menerapkan sistem jemput bola. Sistem ini dilakukan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan mendatangi rumah sakit tempat para korban kecelakaan di rawat.

Bukan hanya itu, sebagai wujud dalam menerapkan PRIME PT. Jasa Raharja cabang sulawesi tengah, dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Polres Palu, Dimas Kesehatan Sulteng dan Tiga rumah sakit (RS) yang ada di palu. Kerjasama yang dimaksud, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kepala cabang PT Jasa Raharja Sulteng, Nasir Obed, Kapolres Palu, AKBP Trisno Rahmadi Sik, Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, Direktur RS Anutapura, RS Budi Agung dan RS Madani, di

⁴ Budi raharjo dalam media raharja, Meningkatkan Kinerja Jasa Raharja Lebih Baik. Edisi Maret 2013. Hlm.3

⁵ Hasil wawancara dengan pak Junawan selaku Bagian Umum Di PT. Jasa Raharja Cabang Palu. tanggal 21 Februari 2014 jam 10.00 wita.

Rupatama Polres Palu, pada 26 Desember 2014.⁶

PT. Jasa Raharja dalam melakukan kerja sama ini diharapkan untuk meningkatkan pelayanan baik terhadap penumpang maupun terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan dengan begitu kewajiban PT. Jasa Raharja sebagai penyalur santunan dapat terlaksana dengan cepat, aman dan mudah.⁷

Semua penumpang yang menjadi korban atau ahli waris korban yang dijamin atau terjamin oleh UU No. 33 Tahun 1964 Jo PP No. 17, berhak mengajukan permintaan untuk mendapatkan santunan asuransi kecelakaan penumpang. Pengajuan santunan tersebut, diajukan kepada salah satu kantor Cabang/Perwakilan PT. Jasa Raharja, baik kantor yang berada di daerah tempat kecelakaan terjadi maupun daerah di mana korban/ahli waris korban berdomisili. Dalam pengajuan asuransi kecelakaan, perlu memperhatikan ketentuan berikut :

- a. Dalam hal domisili korban/ahli waris korban sama dengan tempat terjadinya kecelakaan (daerah/wilayah kerja Cabang PT. Jasa Raharja), maka permintaan pembayaran santunan asuransi dilayani dan diselesaikan oleh kantor cabang yang bersangkutan.
- b. Dalam hal domisili korban/ahli waris korban berlainan dengan daerah tempat terjadinya kecelakaan, maka permintaan hak atas santunan asuransi dapat diajukan kepada salah satu Kantor Cabang PT. Jasa Raharja yang terdekat dan mudah dicapai oleh korban/ahli waris korban.
- c. Kantor cabang Pt. Jasa Raharja yang terdekat dan mudah dicapai oleh korban dan ahli waris korban dapat melayani dan menyelesaikan dan menyelesaikan permintaan serta pembayaran santunan asuransi, harus dilengkapi dengan keterangan

mengenai hal kecelakaan yang terjadi dan kelengkapan dokumen/berkas yang disyaratkan untuk memperoleh hak atas santunan asuransi, harus diberikan/diisi oleh para pejabat yang berwenang dari daerah tempat terjadinya kecelakaan.

- d. Dalam pengajuan permintaan santunan asuransi digunakan formulir daftar isian yang disebut *Daftar Isian untuk mendapatkan Santunan Dana*, Yang merupakan dokumen dasar dalam penyelesaian permintaan jaminan sosial berupa santunan asuransi.
- e. Pengajuan permintaan santunan asuransi akan menjadi kedaluwarsa/gugur bila tidak diajukan dalam waktu 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
- f. Hak atas santunan asuransi akan menjadi kedaluwarsa/gugur bila tidak ada penagihan dari korban atau ahli waris korban dalam waktu 3 bulan setelah hak tersebut diakui, ditetapkan dan disahkan oleh PT. Jasa Raharja.

Mengenai pengajuan asuransi kecelakaan oleh penumpang yang menjadi korban atau ahli waris korban, terdapat prosedur untuk melakukan pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan tersebut. Adapun hal-hal atau persyaratan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban untuk melakukan pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Penumpang yaitu:

- a. Menghubungi kantor Jasa Raharja setempat atau terdekat
- b. Mengisi formulir pengajuan , adapun dokumen yang harus dilengkapi yaitu:
 - a) surat keterangan kecelakaan dari instansi berwenang misalnya laporan kepolisian mengenai kecelakaan yang terjadi.
 - b) surat kesehatan korban akibat kecelakaan , kuitansi, rician biaya perawatan, dan fotocopi resep dari rumah sakit/puskesmas/dokter yang merawat.
- c) siapkan KTP asli korban/ahli waris, kartu keluarga, surat nikah, dan keterangan ahli waris (bagi korban

⁶ Jasa raharja gandeng polres, dinkes dan rumah sakit dalam www.radarsulteng.co.id. Diakses pada 25-2-2014 jam 15.40.

⁷ Pak Junawan. *Op'cit.*.

meninggal dunia) dari kelurahan atau kepala desa sesuai alamat KTP ahli waris.

Setelah berkas tersebut telah lengkap dan telah diserahkan kepada PT. Jasa Raharja, maka korban atau ahli warisnya menunggu pengesahan pengajuan tersebut. Setelah adanya pengesahan, maka dana santunan tersebut akan di transfer ke rekening tabungan BRI korban ataupun ahli waris serta sejalan dengan moto baru PT. Jasa Raharja, pembayaran santunan dilakukan dengan mendatangi rumah korban/tempat korban dirawat.⁸

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan penumpang diberikan kepada korban atau ahli waris korban dilaksanakan untuk korban yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) hari dan untuk pengajuan perawatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari atau seminggu.

2. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan PO. Sumber Sejahtera Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan

Pasal 197 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa *Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat peyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.* Pasal 235 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.

Ketentuan di atas merupakan salah satu dasar tanggung jawab perusahaan pengangkutan terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan. Tanggung jawab perusahaan didasarkan pula pada perjanjian pengangkutan yang dilakukan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang. Dimana tanggung jawab ini berlaku ketika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian

terhadap penumpang, baik itu kerugian materiil dan/atau kerugian non materiil.

PO. Sumber Sejahtera, dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap penumpang, perusahaan PO. Sumber Sejahtera mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak perusahaan asuransi. Sebagaimana perintah dalam Pasal 189 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa *perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 188.* Dengan perintah tersebut, PO. Sumber Sejahtera mengalihkan tanggung jawabnya kepada perusahaan asuransi yakni PT. Jasa Raharja.

Pengalihan tanggung jawab tersebut dibuktikan dengan pembayaran premi, dengan menyetorkan Iuran Wajib yang terkumpul dari setiap penumpang 6 bulan sekali, dengan jumlah Rp. 270.000,00.

Pengalihan tanggung jawab terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan menjadi tanggung jawab penuh pihak jasa raharja. Dengan begitu, PO. Sumber Sejahtera hanya memiliki tanggung jawab sosial dan/atau beban moril terhadap penumpang pengguna jasa perusahaan. tanggung jawab moril ini pula dilakukan dengan maksud pembangunan berkelanjutan terhadap perusahaan pengangkutan PO. Sumber Sejahtera.⁹

Adapun kasus kecelakaan yang menimpa PO. Sumber Sejahtera kurun waktu 10 tahun terakhir :

Tabel 5 : Jenis Kecelakaan Yang Pernah Terjadi

Bentuk Kecelakaan	Frekuensi
Tabrakan	5
Menabrak	2
Terbalik	3
Jumlah	10

Sumber : Data primer dari tahun 2005-2012.¹⁰

Dari data di atas, terlihat bahwa umumnya kecelakaan yang dialami oleh pengusaha pengangkutan PO. Sumber

⁸ Hasil wawancara bersama pak junawan selaku kepala bagian umum di PT. Jasa Raharja Cabang Palu, hari jum'at 21-02-2014 pukul 10.00

⁹ Hasil Wawancara bersama Pak M.Saing selaku kepala perwakilan PO. Sumber Sejahtera. 19 februari 2014 jam 11.00

¹⁰ Ibid.

Sejahtera dalam kategori tabrakan, setengah dari jumlah kecelakaan yang terjadi dalam bentuk tabrakan. Selebihnya dalam bentuk Menabrak dan Terbaik. Hal ini dipengaruhi kondisi jalanan.

Kecelakaan terparah yang pernah dialami PO. Sumber Sejahtera, dimana kendaraan bus benomor polisi DD 7848 AA terjungkal dari jembatan di mamuju yakni pada tanggal 23 maret 2006¹¹, yang mengakibatkan kerugian pada penumpang. Adapun rincian akibat kecelakaan tersebut

Tabel 6 : Data Korban Kecelakaan PO. Sumber Sejahtera Tahun 2006

Sifat Cidera	Korban
Meninggal Dunia	12
Luka-Luka	15
Cacat Tetap	-
Jumlah	27

Kasus kecelakaan di atas, dimana pihak jasa raharja sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap penumpang selain dari pada perusahaan pengangkutan PO. Sumber Sejahtera, dalam memberikan santunan. Adapun besaran santunan dari PT. Jasa Raharja, yakni :

Tabel 7 : Besaran Santunan PT. Jasa Raharja Pada Kecelakaan PO.Sumber Sejahtera Pada 2006

Sifat Cidera	Korban	Jumlah Santunan
Meninggal Dunia	12	120.000.000,00
Luka-Luka	15	75.000.000,00
Cacat Tetap	-	-
Jumlah	27	195.000.000,00

Sumber : Data Primer dari PT. Jasa Raharja Cabang Palu

PO. Sumber Sejahtera sebagai salah pihak yang bertanggung jawab dalam kasus kecelakaan di atas. Namun tanggung jawab ini, merupakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk perikemanusiaan dan/atau kesukarelaan terhadap korban. Hal ini dikarenakan bahwa tanggung jawab

tersebut telah menjadi kewajiban PT. Jasa Raharja, sebagai pihak penanggung dalam memberikan santunan.

PO. Sumber Sejahtera dalam kasus-kasus kecelakaan yang pernah terjadi, memberikan bantuan, namun bantuan itu dilaksanakan dengan alasan perikemanusiaan dan/atau kesukarelaan, bukan karena kewajiban. Adapun bentuk tanggung jawab tersebut yakni :

1. Melakukan pengurusan terhadap penumpang yang menjadi korban
2. Membantu korban dalam pengurusan klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja
3. Memberikan biaya perawatan sementara terhadap korban luka-luka
4. Memberikan sumbangan kepada korban dan/atau ahli warisnya dengan sejumlah uang sebagai biaya meringankan beban korban dan/atau ahli warisnya.

Tabel 8 :Besaran Dana Sumbangan PO. Sumber Sejahtera Dalam Kecelakaan Tahun 2006.

Jenis Cidera	Korban	Jumlah Santunan
Meninggal Dunia	12	24.000.000,00
Luka-Luka	15	15.000.000,00
Cacat Tetap	-	-
Jumlah	27	39.000.000,00

Sumber : Data Hasil Wawancara¹²

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Jasa Raharja sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan penumpang. Di mana PT. Jasa Raharja memiliki tanggung jawab dalam pemberian santunan asuransi terhadap setiap penumpang yang mengalami kerugian berupa kematian, luka-luka dan cacat tetap. Yang pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan tersebut diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Jo PP No.17 dan besarnya santunannya diatur dalam

¹¹ Kecelakaan sumber sejahtera dalam <http://liputan6.com> diakses 10 februari 2014. Pukul 13.10

¹² M. Saing. Op'Cit

Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.010/2008.

2. PO. Sumber Sejahtera terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan, bertanggung jawab namun sebatas tanggung jawab sosial saja dan/atau tanggung jawab peri kemanusiaan, yakni mengantarkan kepulangan korban meninggal, memberikan biaya perawatan sementara terhadap korban luka-luka, membantu pengurusan klaim asuransi pada PT. Jasa Raharja dan memberikan sumbangan kepada keluarga korban yang meninggal dunia.

B. Saran

1. Sehubungan dengan jumlah besaran santunan terhadap korban kecelakaan penumpang, perlu dilakukan perubahan jumlah lebih banyak lagi. Hal ini dikarenakan jumlah yang saat ini terbilang kecil, yang dikarenakan semakin meningkatnya perekonomian di Indonesia.
2. Jasa Raharja harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai sistem jemput bola secara langsung yang dilakukan PT. Jasa Raharja kepada masyarakat korban kecelakaan, disamping itu juga hendaknya terus meningkatkan kerjasama kepada pihak-pihak terkait lainnya.
3. Disarankan kepada semua perusahaan pengangkutan khususnya PO. Sumber Sejahtera untuk memperhatikan keselamatan penumpang agar tidak menimbulkan kecelakaan di jalan yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak, khususnya penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Garnie, Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, 2011.
- Purba, Radiks. *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, 1997.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III Hukum Pengangkutan*, Djambatan, 2003.
- , *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VI Hukum Pertanggungan*, Djambatan, 1996.
- Suparman Sastrawidjaja, Man. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, PT. Alumni, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang *Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137).
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Penumpang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28).

C. Internet

- <http://www.statistikperhubungan.go.id>
- <http://Annualreportjasaraharja.co.id>
- <http://www.jasaraharja.co.id/>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas
- www.antarasulteng.com.

BIODATA

ARI PURNOMO ADJI, Lahir di,, Alamat
Rumah Jalan, Nomor Telepon +62.....,
Alamat Email

